



KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN MEGAWATI TAHUN 2001 – 2004

SKRIPSI

Oleh :

Indah Rizki Aruma Nurjannah

NIM 120210302006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN MEGAWATI TAHUN 2001 – 2004

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan Program Strata Satu (S1) Prodi Pendidikan Sejarah
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

Indah Rizki Aruma Nurjannah

NIM 120210302006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

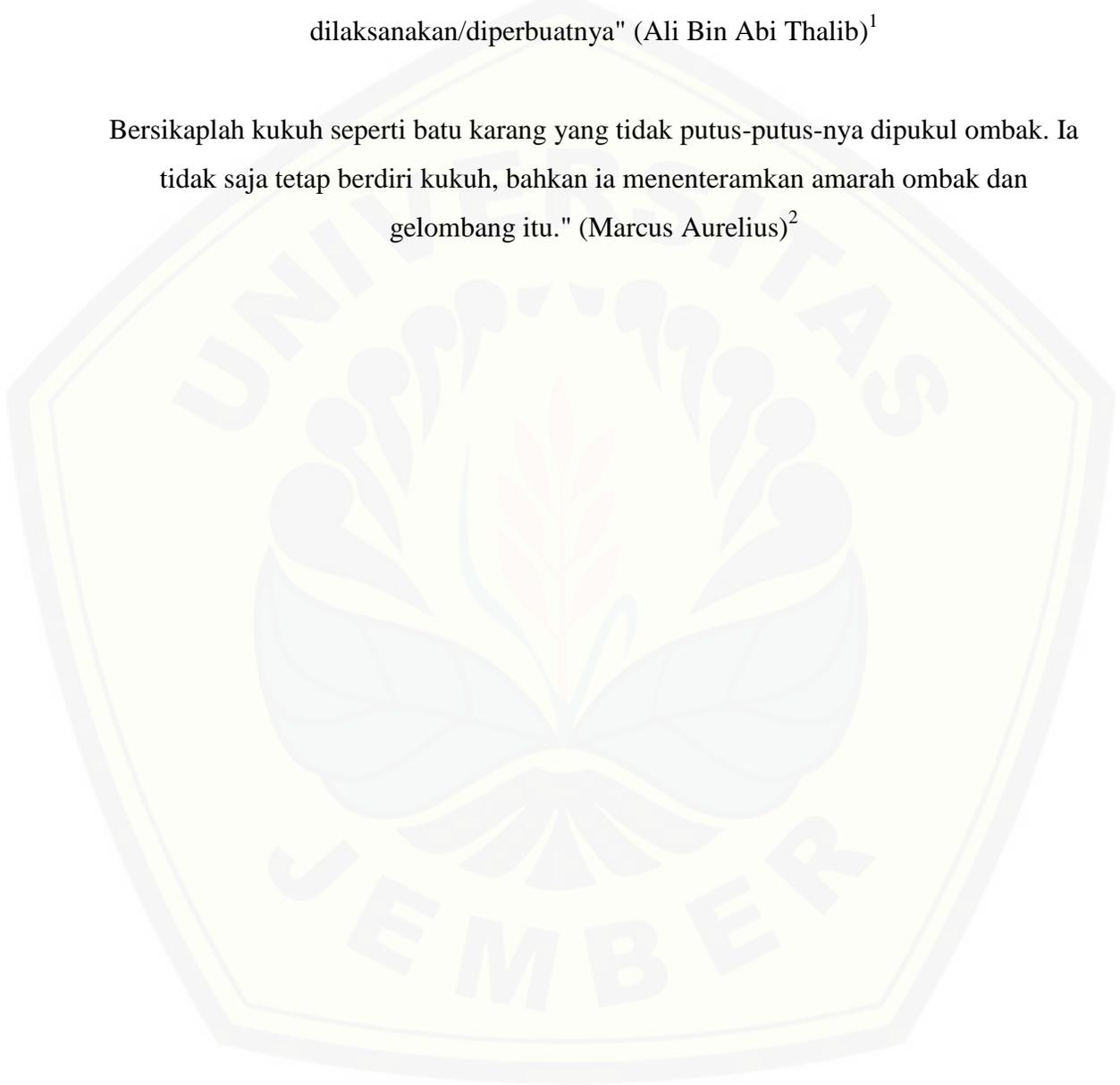
Dengan ucap syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Suciani dan ayahanda Haryono yang sangat saya cintai dan kasihi karena telah membesarkan, mendoakan serta memberi kasih sayang yang sangat luar biasa;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTTO

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya" (Ali Bin Abi Thalib)¹

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu." (Marcus Aurelius)²



1. Ubaidillah, Ratrioso I, 2004, "Kata-Kata Bijak Para Tokoh Terkenal", Jakarta, Eska Media. Hal. 45

2. Ibid, Hal. 45

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Rizki Aruma Nurjannah

NIM : 120210302006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001-2004” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 April 2017

Yang menyatakan,

Indah Rizki Aruma N
NIM. 120210302006

SKRIPSI

**KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN MEGAWATI
TAHUN 2001-2004**

Oleh :
Indah Rizki Aruma Nurjannah
NIM 120210302006

Pembimbing

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Nurul Umamah, M. Pd.

Dosen Pembimbing 2 : Drs. Marjono, M. Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001-2004” ini telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Selasa, 11 April 2017
tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurul Umamah, M, Pd.
NIP. 19690204 199303 2 008

Drs. Marjono, M.Hum.
NIP 19600422 198802 1 001

Anggota I

Anggota II

Dr. Sumardi, M. Hum.
NIP. 19600518 198902 1 001

Drs. Sugiyanto, M. Hum
NIP. 19570220 198503 1 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M. Sc. Ph. D.
NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001-2004; Indah Rizki Aruma Nurjannah, 120210302006; 2017; **xiv + 125** halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Megawati merupakan salah satu sosok pemimpin wanita berpengaruh di Indonesia, Megawati terpilih menjadi presiden pada tahun 2001. Adapun SI – MPR tersebut diselenggarakan dalam rangka menanggapi langkah presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar (Soebachman, 2015:152). Karena pada tanggal 23 Juli 2001 MPR secara resmi “melengserkan” Presiden Gus Dur, otomatis wakil presiden Megawati Soekarnoputri naik jabatan untuk menggantikannya. Presiden Republik Indonesia yang ke – 5 adalah Megawati Soekarnoputri. Megawati merupakan presiden wanita pertama yang ada di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana kiprah Megawati dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia sebelum tahun 2001 ?; (2) bagaimana kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri pemerintahan Megawati tahun 2001-2004 ?; (3) apa dampak kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri pemerintahan Megawati tahun 2001-200 ? Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk menganalisis kiprah Megawati dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia sebelum tahun 2001; (2) untuk menganalisis kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri pemerintahan Megawati tahun 2001-2004; (3) untuk menganalisis dampak kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri pemerintahan Megawati tahun 2001-2004.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah perjalanan politik praktis Megawati dimulai sebagai kader partai PDI, selanjutnya motor perolehan suara dan menjadi sebagai Anggota DPR dalam posisi partai PDI menuju puncak kekuasaannya. Tahun 2000 menjadi awal dari perjalanan politik yang sesungguhnya Megawati menjabat sebagai wakil presiden republik Indonesia yang ke-8. Dan menjadi prestasi tersendiri

bagi Megawati tatkala tahun 2001 menjadi Presiden ke 5 dengan dimakzulkannya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan.

Simpulan dari penelitian ini adalah selama menjabat sebagai presiden republik indonesia yang ke-5 Megawati banyak melakukan perubahan, walaupun perubahan tersebut tidak terlalu signifikan tapi menjadi awal dari sebuah pondasi politik indonesia, yaitu kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang kesemuanya hampir fokus dalam hal perpolitikan. Salah satunya adalah stabilitas nasional dengan langkah yang paling konsen adalah Pemberantasan Korupsi dengan dibentuknya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mengesahkan beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk mengawal setiap kebijakan negara.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyampaikan saran yaitu :

- (1) Kepada para Mahasiswa calon guru sejarah, Penelitian ini diharapkan dapat mengasah dan memahami secara mendalam mengenai perjalanan Politik Presiden Megawatie Soekarnoputri tahun 2001-2004;
- (2) Kepada almamater, hendaknya mau memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian yang sesuai keinginannya, terutama yang berada di wilayah sendiri, sehingga akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara;
- (3) Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perjalanan politik praktis Megawati Soekarnoputri, dan dapat mengambil nilia-nilau tauladan yang dicontohkan dari sosok Megawati, baik dalam hal perjalanan politik, hambatan, perjuangan, dan kepemimpinannya.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001-2004*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Proses penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph. D., Selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M. Sc. Ph. D., Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Sukidin, M. Pd. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Dr. Nurul Umamah, M. Pd. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah serta Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi ini;
5. Drs. Marjono, M. Hum., Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi ini;
6. Drs. Sugiyanto, M.Hum, selaku Penguji Anggota I, dan Dr. Sumardi, M.Hum. selaku Dosen Penguji Anggota II yang telah memberikan masukan yang berguna bagi penyempurnaan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama menyelesaikan studi di Pendidikan Sejarah;

8. Kedua orang tuaku yang tiada kenal lelah dalam memberi kasih sayang, mendidik, memberikan doa dan motivasi selama ini;
9. Teman-teman angkatan 2012 khususnya Irfana, Mega, Puri, Eka, Vivin, Novia, Quraisyi, Fajar, Robit, Iren, yang telah memberikan semangat dan bantuannya demi terselesaikannya skripsi ini;
10. Adik-adik angkatan serta kawan GMNI yang sudah memberi semangat atas terselesaikannya skripsi ini;
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Setiap karya yang dihasilkan manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis menerima dengan tangan terbuka segala bentuk kritik yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 11 April 2017

Penulis

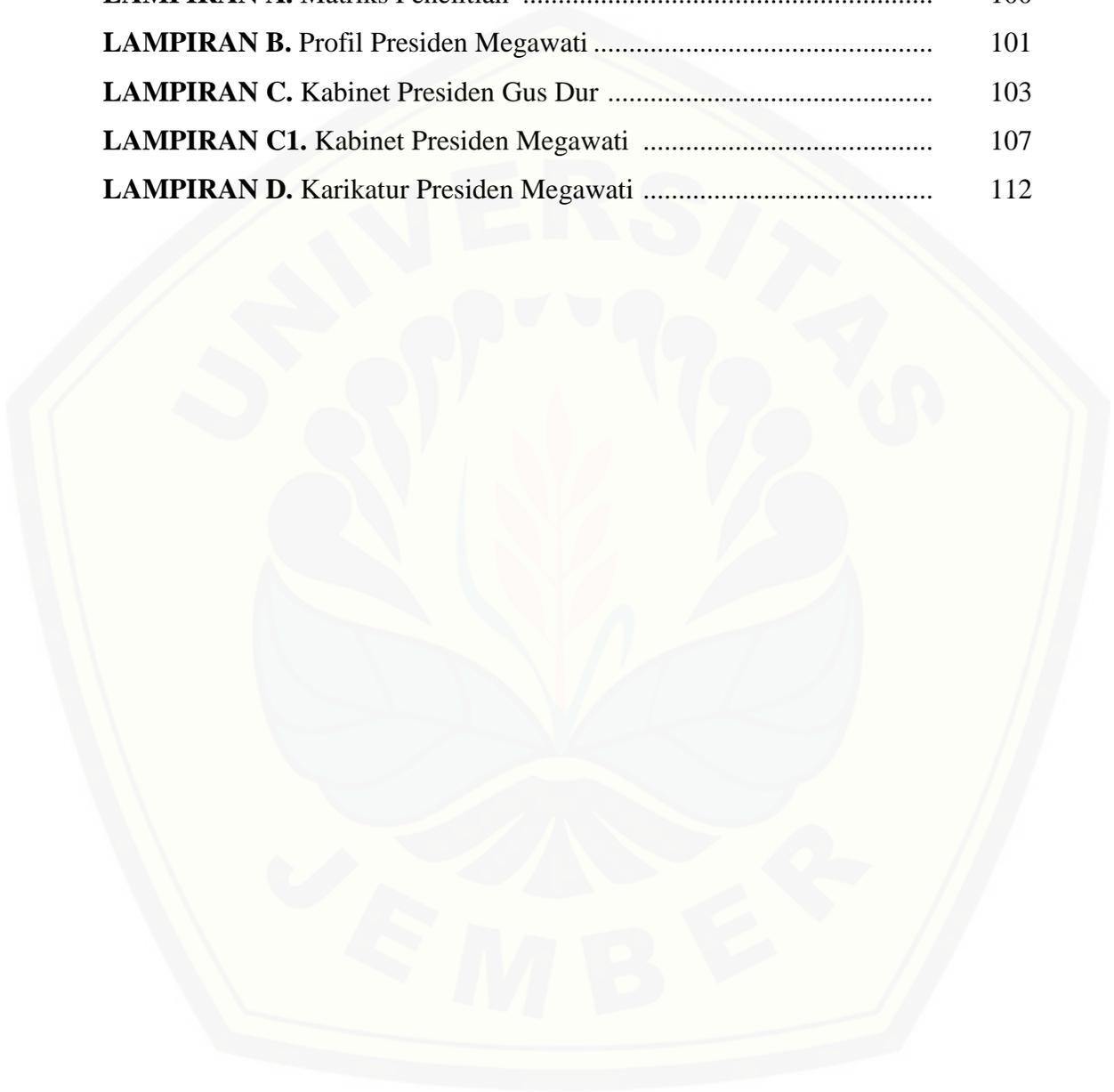
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN AWAL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Judul	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB 3. METODE PENELITIAN	20
3.1 Heuristik	20
3.2 Kritik	21
3.3 Interpretasi	22
3.4 Historiografi	23
BAB 4. MEGAWATI DALAM PANGGUNG POLITIK INDONESIA SEBELUM TAHUN 2001	26

4.1 Awal Perpolitikan Megawati	26
4.2 Megawati Sebagai Wakil Presiden	30
BAB 5. KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN MEGAWATI	
TAHUN 2001-2004	45
5.1 Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Megawati	45
5.1.1 Stabilitas Nasional	45
5.1.2 Pemberantasan Korupsi	55
5.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintahan Megawati	72
5.2.1 Militer dan Pertahanan	75
5.2.2 Penanggulangan Terorisme	76
5.2.3 Hutang Luar Negeri	77
BAB 6. DAMPAK KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN	
MEGAWATI TAHUN 2001-2004	80
6.1 Dampak Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Megawati	80
6.1.1 Dampak Politik	80
6.1.2 Dampak Sosial	83
6.1.3 Dampak Ekonomi	85
6.2 Dampak Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintahan Megawati	89
6.2.1 Dampak Politik	89
6.2.2 Dampak Ekonomi	91
BAB 7. KESIMPULAN	94
7.1 Kesimpulan	94
7.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Matriks Penelitian	100
LAMPIRAN B. Profil Presiden Megawati	101
LAMPIRAN C. Kabinet Presiden Gus Dur	103
LAMPIRAN C1. Kabinet Presiden Megawati	107
LAMPIRAN D. Karikatur Presiden Megawati	112



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Megawati Soekarnoputri merupakan putri Presiden Republik Indonesia pertama, Sukarno. Lahir tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Sebagai seorang anak presiden, sudah pasti masa kecil Megawati punya nuansa berbeda dengan anak-anak lainnya. Pengalaman Megawati pun lebih banyak terkait dengan jabatan sang ayah (Soebachman, 2015:147). Misalnya pengalaman sering ikut bertemu tamu dari luar negeri, sering ikut tampil menari di hadapan tamu di Istana Negara. Bukan hanya pengalaman yang menyenangkan, tapi pengalaman buruk pun pernah Megawati rasakan. Semua pengalaman sebagai anak presiden tersebut pasti membekas dalam ingatan Megawati. Memperkaya pengalaman hidup sekaligus pengalaman berpolitik Megawati di kemudian hari.

Pendidikan politik Megawati terbilang kurang. Megawati memang tidak pernah mengenyam pendidikan politik secara formal, tetapi di dalam jiwanya tersimpan bakat dan warisan luhur ayahnya. Megawati selalu bersosialisasi dengan politik secara intensif. Megawati mengaku tidak pernah belajar ilmu politik, justru yang sering Megawati lakukan adalah mengamati dan mendengarkan secara seksama tindakan keseharian ayahnya yang notabennya memang sebagai aktor politik (Effendi, 2014:178). Megawati belajar bagaimana cara berpolitik, cara bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya, baik dari keluarga, teman-teman, bahkan masyarakat sekitar. Sebab itu pula yang menyebabkan Megawati memiliki banyak ilmu politik.

Tahun 1986 Megawati dipandang sebagai pendatang baru dalam dunia politik Indonesia. Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya, menurutnya Megawati belum berpengalaman dalam kancah dunia politik. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara dan akhirnya Megawati pun menjabat wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Tak

disangka karier politiknya terbilang melesat. Megawati hanya butuh waktu satu tahun untuk menjadi anggota DPR/MPR-RI (Soebachman, 2015:148). Waktu yang sangat singkat itu, Megawati dapat membuktikan kepada teman bahkan ayahnya bahwa Megawati mampu mengenyam kehidupan politik yang baik. Salah satu peristiwa penting yang melibatkan Megawati saat menjadi anggota DPR ketika dimintai untuk melobi delegasi parlemen Kuba. Megawati kala itu juga tercatat sebagai anggota Badan kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Dengan berhasilnya Megawati di kancah politik, maka semakin banyak pula orang yang semakin membenci Megawati.

Masa kampanye Pemilu 1987, Megawati menjadi primadona bagi massa PDI. Megawati menikmati peran tersebut meski Megawati telah mengingkari kesepakatan dengan keluarga Bung Karno untuk tidak berpolitik. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat (Ma'ruf, 2013:102). Megawati sangat konsisten dengan jabatannya itu meski telah ditentang oleh keluarga. Megawati bekerja secara profesional yang dibantu oleh anggotanya. Karena itulah DPC PDI Jakarta Pusat dapat berkembang dengan sangat pesat dan sempat membuat pemerintahan orde baru terancam.

Pemerintah Orde Baru merasa Megawati menjadi ancaman terhadap kepentingan-kepentingan Suharto. Suharto semakin terancam ketika pamor Megawati sebagai politisi semakin menonjol. Pada tahun 1993 Megawati berhasil menjadi Ketua Umum PDI. Kepemimpinannya di dalam partai sempat jatuh ketika Kongres PDI di Medan pada tahun 1996. Dalam kongres tersebut, Surjadi yang terpilih menjadi ketua umum. Terpilihnya Surjadi sebagai ketua umum PDI yang baru tidak lepas dari campur tangan Orde Baru, kondisi ini membuat Megawati kecewa dan merasa tidak puas. Namun kubu Soerjadi yang didukung oleh pemerintah mengancam akan merebut paksa kantor pusat PDI yang dikuasai Megawati (Ma'ruf, 2013:105). Ancaman ini dibuktikan oleh Soerjadi dengan menyerang kantor PDI dan menangkap serta menghukum kader PDI yang pro – Megawati. Megawati tidak tinggal diam, Megawati berusaha untuk tetap mempertahankan jabatan serta kantor PDI bersama pendukung yang masih pro terhadapnya.

Keberpihakan masa PDI kepada Megawati makin terlihat pada perolehan suara PDI pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah pimpinan Soerjadi merosot tajam (Soebachman, 2015:151). Sebab masa Megawati menyalurkan aspirasi suara mereka ke Partai Persatuan Pembangunan. Namun, Megawati sendiri memilih untuk golput. Situasi ini menguntungkan Megawati dalam kancah politik nasional. Pada tahun 1999 setelah terbukanya kran demokrasi dibawah pemerintahan Habibie dan jatuhnya Orde Baru, Megawati mendeklarasikan pendirian PDI-P dan terbukti mendapat suara paling banyak di antara partai – partai lain.

Wibawa Megawati tidak pernah luntur di mata pendukungnya. Pada pemilihan umum 1999, partai yang dibangunnya mendapatkan suara terbanyak, yaitu 33,76% atau 153 kursi. Ini adalah perolehan suara yang sangat luar biasa dari seorang Megawati (Effendi, 2014:179). Semua penderitaan dan tekanan yang Megawati alami pada masa Orde Baru berbuah manis, meskipun kemenangan besar ini tidak menjadikannya sebagai presiden. Megawati kalah dari Gus Dur yang terpilih sebagai presiden menggantikan Habibie. Pada waktu itu Megawati hanya menjabat menjadi Wakil Presiden RI yang ke-8. Namun, beberapa waktu kemudian, Megawati berhasil menjadi orang nomer satu di Indonesia setelah Gus Dur lengser dari jabatannya.

Megawati terpilih menjadi presiden pada tahun 2001. Adapun SI – MPR tersebut diselenggarakan dalam rangka menanggapi langkah presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar (Soebachman, 2015:152). Karena pada tanggal 23 Juli 2001 MPR secara resmi “melengserkan” Presiden Gus Dur, otomatis wakil presiden Megawati Soekarnoputri naik jabatan untuk menggantikannya. Presiden Republik Indonesia yang ke – 5 adalah Megawati Soekarnoputri. Megawati merupakan presiden wanita pertama yang dimiliki Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi dan prestisi secara pribadi bagi Megawati.

Megawati memang tidak lihai dan kurang garang dalam berpolitik. Kemampuan intelektualnya juga tidak semumpuni ayahnya. Akan tetapi, rakyat Indonesia tidak hanya butuh pemimpin yang nampak garang namun juga butuh seorang pemimpin yang memiliki sifat mengayomi, sifat keibuan, dan Megawati

mampu menjawab kebutuhan itu (Effendi, 2014:180). Apalagi Megawati dikenal sebagai sosok yang selalu berposisi dengan pemerintahan. tentu saja ekspektasi rakyat sangat tinggi terhadap Megawati. Sehingga wajar saja meskipun tanpa pendidikan politik secara formal Megawati piawai menjalankan roda pemerintahan dan dapat memimpin negara Indonesia dengan cukup baik.

Pada masa pemerintahan Megawati, banyak sekali hal yang sudah dicapai. Di antaranya mampu menekan angka jumlah kemiskinan tahun 2003, devisa stabil, tingkat inflasi rendah, dan lain sebagainya. Bidang politik, pemerintahan Megawati dinilai mampu meletakkan dasar-dasar demokrasi dengan benar, perjuangan dan cita-cita reformasi mampu diapresiasi Megawati dalam masa pemerintahannya. Amandemen UUD 45 mampu diselesaikan dengan lancar. Selain itu, pada masa Megawati pertama kalinya sistem pemilihan langsung diselenggarakan, tonggak-tonggak demokrasi perlahan mulai ditegakkan, salah satunya dengan kebebasan pers. Dalam hal politik, Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi, baik teritorial, sosial, maupun wawasan.

Bidang penegakan hukum cita-cita mewujudkan supremasi hukum dan tekad untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku tindak KKN masih jauh dari harapan. Selama berkuasa hampir 3 tahun, Megawati masih belum mampu membasmi tuntas KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Sementara itu kewibawaan hukum dan lembaga penegak hukum dalam pandangan masyarakat merosot. Di bidang pertahanan dan keamanan, pemantapan fungsi dan peran TNI dan Polri yang telah dipisahkan masih belum selesai (Hadi: jilid 8, 2004:9). Ini disebabkan kurangnya kerjasama dan koordinasi Megawati dengan kabinet yang berfungsi menangani KKN tersebut.

Masa kepresidenan Megawati tidak lepas dari politik luar negeri. Ada kebijakan politik yang baru dalam pemerintahan Megawati, yaitu memulai berani menjalin kerjasama dengan negara di luar Amerika (Kumolo, 2004:105). Selama melaksanakan politik luar negeri, yang menjadi prioritasnya adalah menjalin hubungan baik dengan negara tetangga, khususnya dengan kawasan ASEAN dan

Timor Leste, negara yang pernah jadi bagian NKRI. Megawati keluar masuk negara lain hanya untuk menyelesaikan masalah kerjasama / konflik yang terjadi. Kunjungan itu merupakan satu kebutuhan dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Megawati mengikuti politik luar negeri yang bebas dan aktif dari para *founding fathers*, yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Banyak dinamika yang terjadi saat Megawati menjadi presiden, namun Megawati menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dia mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Setiap kebijakan yang dilakukan Megawati ada pula yang berdampak buruk bagi Indonesia. Salah satunya kebijakan *Outsourcing*. Megawati membuat kebijakan berupa pemberlakuan sistem *Outsourcing* pada tenaga kerja (Soebachman, 2015:154). Sistem ini merugikan para karyawan dan buruh se-Indonesia. Sistem ini merupakan sistem kerja yang tidak langsung mengontrak tenaga kerja, namun pekerja dapat di pecat sewaktu-waktu jika sudah tidak dibutuhkan kembali. Kebijakan *Outsourcing* inilah yang sangat menarik bagi peneliti, sebab ironisnya menteri tenaga kerja RI pada waktu itu adalah Jacob Nuawea yang berasal dari PDI-P, yang sebelum jadi menteri dikenal sebagai pjuang hak-hak buruh.

Sama halnya dengan Presiden terdahulu, banyak pro dan kontra yang terjadi. Meski banyak masa yang kontra terhadapnya, Megawati tetap menjalankan kursi pemerintahan yang menurutnya benar. Perjalanan Megawati menjadi presiden, Megawati memiliki sekian gagasan bagus namun tidak semua dapat Megawati realisasikan. Banyak kritikan terhadapnya karena mengeluhkan pekerjaannya (Ma'ruf, 2013:118). Namun Megawati terus bersabar, Megawati lebih memilih untuk diam sambil terus bekerja, karena diam itu adalah hak dan cara politik Megawati.

Presiden Megawati sejak awal telah memilih sikap untuk tidak banyak berbicara dalam berpolitik. Karena menurutnya itu strategi menghadapi keruhnya dunia politik Indonesia yang dipenuhi permainan dan intrik politik. Menurutnya masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan daripada harus menanggapi masalah-masalah yang sebenarnya diakibatkan oleh kesalahan persepsi terhadapnya (Hadi:jilid 8, 2004:16). Sangat bijaksana dalam menanggapi setiap masalah yang

kontra terhadapnya itulah yang menjadi kelebihan sosok Megawati di mata masyarakat Indonesia. Sosok wanita yang mampu membangun partai politik Pdi Perjuangan yang dalam pemilihan umum menang dua kali dan menjadi salah satu partai besar di Indonesia.

Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan melihat perjalanan politik Megawati dari awal sampai menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-lima. Serta lebih difokuskan kepada kebijakan-kebijakan politik presiden Megawati dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan Indonesia pada masa itu baik dalam bidang Ekonomi, sosial dan politik.

Berawal dari latar belakang di atas serta ketertarikan penulis meneliti lebih jauh tentang tata cara pemerintahan Megawati yang terjadi terutama kebijakan politik Megawati saat menjadi presiden, maka penulis menyadari permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam serta dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena itu, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001- 2004”.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul ini dibuat untuk memperjelas dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai judul “Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001 – 2004”, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah yang terdapat dalam judul yang dibuat yaitu kebijakan, politik, dan Megawati.

Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan (Budiarjo, 2003:11). Biasanya suatu kebijakan yang dilakukan oleh penguasa merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.

Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan pemerintahan. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem yang menyangkut menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan – tujuan itu (Budiardjo, 2003:8).

Berdasarkan pengertian diatas, maka maksud yang terkandung dalam judul “Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001 – 2004” adalah segala bentuk keputusan dan tindakan yang diambil oleh Presiden Megawati bersama jajaran kabinetnya mengenai Kebijakan Politik baik di dalam negeri seperti stabilitas nasional dan pemberantasan korupsi, sedangkan kebijakan luar negeri seperti kerjasama sistem pertahanan alutsista dengan negara rusia. Yang kesemunya itu terkait tentang ketatanegaraan dan pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada tahun 2001-2004.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup penelitian amat penting dengan maksud untuk mengarahkan penelitian sehingga tidak keluar dari pokok bahasan yang sudah ada. Selain itu juga untuk mengerucutkan permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu (temporal), tempat (spasial), dan materi.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini dimulai dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Dimulai tanggal 23 Juli 2001 saat dilengserkannya Gusdur dan diangkatnya Megawati menjadi Presiden oleh MPR. Tahun 2004 adalah batasan peneliti diakhir pemerintahan Megawati. Pada tahun 2004 itu masa jabatan Megawati sudah selesai. Perlu diperhatikan bahwa penetapan ruang lingkup (temporal) ini tidaklah bersifat mutlak tetapi fleksibel, karena tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan membahas beberapa kejadian yang berhubungan dengan kepemimpinan Megawati sebelum tahun 2001.

Ruang lingkup tempat (spasial) penelitian ini, lebih memfokuskan peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta mengingat pusat pemerintahan Indonesia

dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut negara (politik) kebanyakan terjadinya di sana. Sedangkan ruang lingkup materi yaitu Kebijakan Politik Presiden Megawati tahun 2001-2004.

1.4 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah :

- 1) bagaimana Megawati dalam panggung politik sebelum menjadi presiden republik Indonesia tahun 2001 ?
- 2) bagaimana kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Presiden Megawati tahun 2001-2004 ?
- 3) bagaimana dampak kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Presiden Megawati tahun 2001-2004 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- 1) untuk menganalisis Megawati dalam panggung politik sebelum menjadi presiden republik Indonesia tahun 2001;
- 2) untuk menganalisis kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Presiden Megawati tahun 2001-2004;
- 3) untuk menganalisis dampak kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Preisden Megawati tahun 2001-2004;

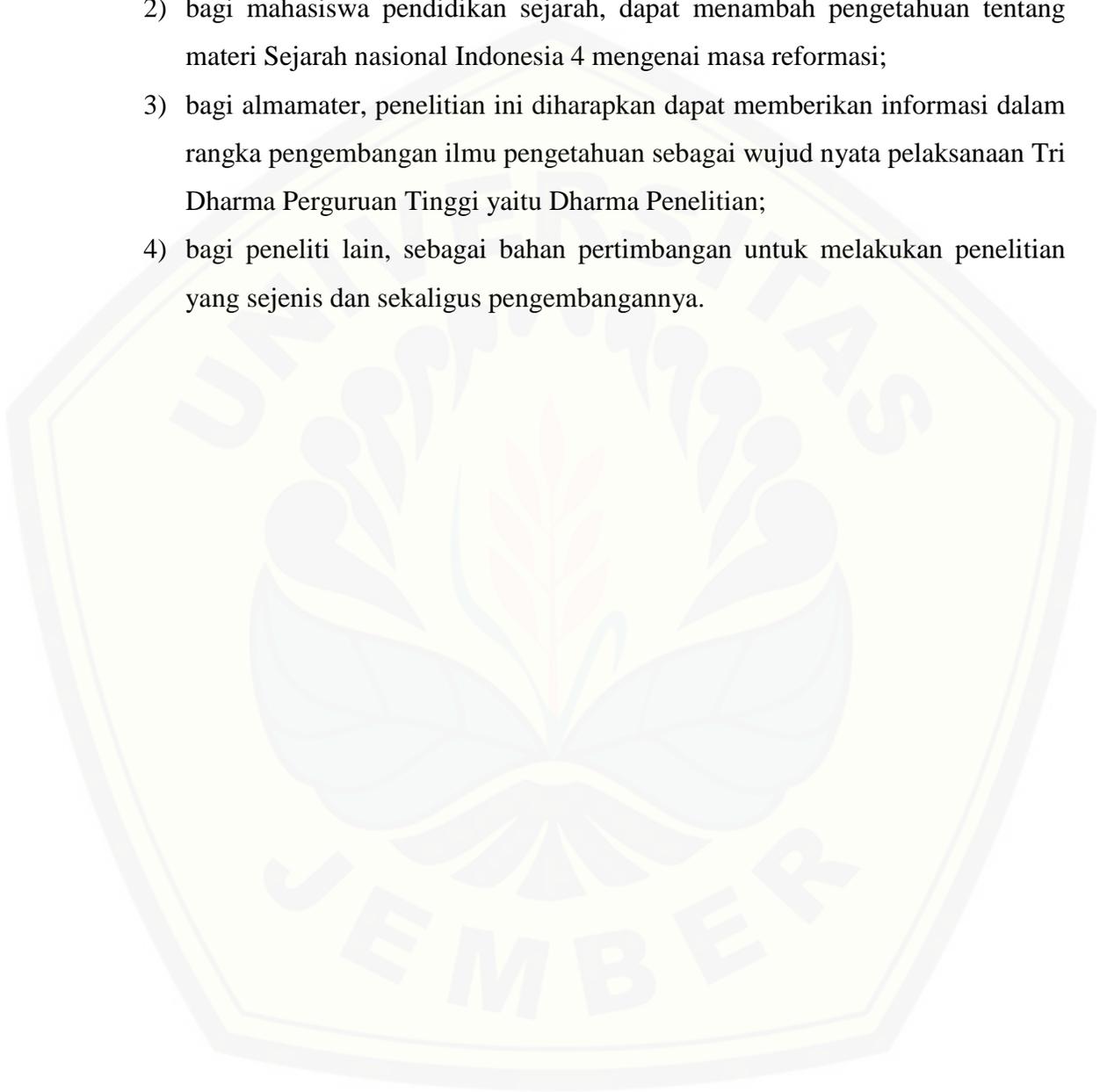
1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat bagi :

- 1) bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta

memperdalam pengetahuan tentang kebijakan politik yang terjadi saat Megawati menjabat sebagai Presiden;

- 2) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang materi Sejarah nasional Indonesia 4 mengenai masa reformasi;
- 3) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian;
- 4) bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengemukakan kajian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan politik presiden Megawati tahun 2001-2004. Kajian teori dilakukan dengan mengumpulkan pendapat atau teori-teori yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka merupakan sebuah pembahasan yang lebih menekankan pada upaya memposisikan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan hasil-hasil terdahulu mencapai tema yang sama. Tinjauan pustaka juga mengemukakan pendekatan dan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Berbagai kajian tentang teori-teori, pendekatan-pendekatan dan penelitian terdahulu diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal dan skripsi.

Kumolo, dkk (2004) dalam pengantarnya *Megawati Soekarnoputri; Presiden Pilihan Rakyat* dalam buku ini dituliskan secara detail pribadi Megawati, kiprah, dan prinsip politiknya. Sosok Megawati adalah sosok yang memiliki popularitas tertinggi sebab apa yang dilakukan, disikapi, dan dicita-citakan Megawati sejalan dengan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia. Salah satu presiden yang tidak ambisius, anti kekerasan, rendah hati, kuat dengan dukungan rakyat. Prinsip Megawati dalam berpolitik adalah diam itu emas. Menurutnya lebih baik diam daripada berkata yang tidak ada manfaatnya. Diam, sabar, dan kerja keras itulah sikap yang dipilih Megawati dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk dalam urusan politik luar negeri. Urusan berpolitik dengan luar negeri Megawati mengambil sikap arif menghormati kunjungan kepala negara lain seperti Amerika. Menurutnya, kerjasama dengan negara lain sangat penting untuk memajukan Indonesia. Ada kebijakan politik luar negeri yang baru dalam pemerintahan Megawati, yaitu memulai berani menjalin kerjasama militer dengan negara di luar Amerika. Seperti yang kita tahu bahwa dari dulu Indonesia hanya menjalin kerjasama militer dengan Amerika. Indonesia selain tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Amerika, Indonesia juga bekerja sama dengan negara Rusia dalam membeli senjata dan pesawat. Secara garis besar buku Tjahjo Kumolo ini sangat membantu dalam penelitian ini, sebab dalam buku ini

mengulas penjelasan mengenai kebijakan politik dalam negeri presiden Megawati, serta menjelaskan mengenai keterlibatan Megawati dalam kancah perpolitikan di Indonesia yang didalamnya juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintahan kabinte Presiden Megawati.

Bahar (1996) dalam bukunya *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993 – 1996*, dalam buku ini dijelaskan mengenai pandangan dan pemikiran politik Megawati Soekarnoputri. Sebelum diangkat menjadi ketua umum PDI, Megawati sepertinya telah memiliki konsep yang cukup transparan terhadap perjuangan politik yang akan Megawati lakukan. Adapun sekilas pemikiran politik Megawati tidak jauh beda dengan pemikiran politik ayahnya, meskipun ada perbedaan yang mencolok. Secara umum menurut peneliti, pandangan dan pemikiran Megawati meliputi tujuh aspek, pertama tentang kepentingan rakyat banyak yang mana menurut Megawati adalah kepentingan yang harus didahulukan, mengingat kepentingan rakyat banyak biasanya dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, termasuk dalam hal demokrasi. Menurut Megawati konsep demokrasi yang harus dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi pancasila yakni sebuah demokrasi yang merupakan penjabaran secara langsung dari sila – sila pancasila. Ketiga persatuan dan kesatuan, sebab menurut Megawati dari sinilah landasan pokok berdirinya Indonesia, sebaliknya jika persatuan dan kesatuan tidak lagi ditegakkan maka Indonesia tidak ada yang namanya saling menghargai dan menghormati. Keempat hak asasi manusia, menurut Megawati HAM ini adalah perwujudan dari eksistensi manusia yang mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan dan merupakan hak bagi setiap warga di Indonesia di hadapan hukum dan konstitusi. Kelima dwi fungsi ABRI, menurutnya rakyat dan ABRI harus saling bekerja sama tidak boleh ada kesenjangan sosial sebab ABRI disini bertugas membantu rakyat. Keenam kesenjangan sosial, menurut Megawati ini merupakan permasalahan serius yang ada di Indonesia. Terakhir yaitu pembangunan Indonesia yaitu Indonesia tidak hanya butuh pembangunan material semata, namun juga membutuhkan pembangunan mental spiritual dan akhlak sebagai suatu bangsa yang berdaulat penuh. Cara yang

dilakukan untuk pembangunan Indonesia yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Dari uraian di atas, buku ini menjadi salah satu sumber rujukan bagi peneliti terkait kiprah politik Megawati sebagai Presiden Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang tentunya hal tersebut untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia. Mencari kebijakan politik yang dilakukan oleh Megawati tidak akan lepas dari cara berfikir serta cara memandang seorang Megawati dalam berpolitik di Indonesia.

Ma'ruf (2013) dalam buku *Megawati Soekarnoputri Riwayat Pribadi dan Politik Putri Bung Karno* menjelaskan tentang biografi dan karir Politik Megawati. Megawati merupakan putri presiden pertama Soekarno dan Fatmawati. Lahir di kampung Ledok Ratmakan, Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947. Dalam usia Megawati yang belia, Megawati terbawa di kehidupan yang revolusioner. Megawati harus hidup dalam persembunyian dan pelarian beserta orangtua dan kakaknya. Semasa kecil, Megawati sudah memiliki sifat lembut dan keibuan. Sifatnya yang lembut dan selalu memihak pada yang lemah dimungkinkan karena Megawati tumbuh dan sekolah bersama rakyat jelata, walau Megawati hidup di Istana. Semasa kuliah, Megawati kuliah di dua Universitas. Pertama Megawati masuk ke Fakultas Pertanian Padjajaran Bandung pada tahun 1965-1967. Di masa inilah Megawati menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung. Tahun 1970-1972 Megawati kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Megawati memulai kiprah politiknya tahun 1987, ketika PDI sedang mencari orang yang bisa mendongkrak suara. Nama Megawati dipasang sebagai salah satu calon legislatif pada daerah pemilihan Jawa Tengah. Ternyata berhasil, PDI naik suaranya dan Megawati pun menjadi anggota DPR RI. Sejak saat itu karir Megawati dalam berpolitik melangit. Ditambah lagi saat Megawati menjadi ketua PDI yang kemudian pada tahun 1996 Megawati dijatuhkan oleh orde baru. Megawati tetap optimis dan melanjutkan politiknya yang diyakini benar. Pada tanggal 21 Juli 2001 Megawati menjadi presiden bersama wakilnya Hamzah Haz. Megawati yakin dapat bekerja sama dengan Hamzah dan mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis. Megawati

memiliki sekian gagasan bagus namun tidak semua dapat Megawati realisasikan. Menurutnya negara Indonesia harus bisa bekerja sama dalam semua komponen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membawa Indonesia lebih maju. Banyak kritikan terhadapnya karena mengeluhkan pekerjaan yang menurutnya berat dan tidak mudah dilakukan karena kurangnya kerjasama antara berbagai pihak. Megawati terus bersabar dan lebih memilih untuk diam sambil terus bekerja, karena diam itu adalah hak politik Megawati. Dan begitulah cara Megawati berpolitik dengan cara diam tidak banyak omong tapi ada hasil dalam dia bekerja untuk memajukan negara Indonesia. Dari uraian dan penjelasan review buku ini memberikan gambaran secara garis besar tentang biografi dan sejarah perjalanan politik Megawati yang bagi peneliti memberikan manfaat untuk dijadikan pertimbangan analisis terkait sosok Megawati dihadapan publik Indonesai. Serta dalam buku ini terdapat keterlibatan Megawati dalam perpolitikan di Indonesia sebelum menjadi presiden RI dan bahkan sampai menjadi presiden serta cara-cara yang dilakukan Megawati dalam memimpin.

Soebachman (2015) dalam *Sprit 7 Presiden RI*, dalam buku ini dijelaskan mengenai kehidupan pribadi presiden ke- 5 Indonesia yaitu Megawati. Megawati merupakan presiden wanita pertama yang dimiliki Indonesia. Diangkat tanggal 23 Juli 2001 ketika Gus Dur dilengserkan dari kursi presiden oleh MPR. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi beliau. Banyak perubahan yang terjadi sewaktu Megawati berkuasa. Pada masa pemerintahan Megawati ini pula dimulainya pemberlakuan kebijakan sistem outsourcing pada tenaga kerja. Sistem ini sangat merugikan para karyawan dan buruh se-Indonesia. Megawati juga sudah membangun stabilisasi kondisi polhukam dalam negeri peninggalan pemerintah sebelumnya (1998-2001) yang penuh dengan kegaduhan sehingga indonesia bisa kembali membangun, politik luar negeri yang lebih bebas aktif, melakukan diplomasi internasional dengan pihak Swedia sehingga Swedia bersedia menangkap terorisme di Indonesia, makin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diadakannya pemilu pertama oleh rakyat bukan oleh MPR lagi dalam pemilihan calon presiden Indonesia, tidak membiarkan pemerintahannya terkooptasi oleh konflik konglomerat, memberikan

kondisi yang kondusif bagi legislatif untuk melakukan fungsi legislasinya sehingga banyak UU yang telah disahkan pada masa Megawati. Namun selama 3 tahun berkuasa, Megawati masih belum mampu memberantas KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Secara garis besar penjabaran dalam buku ini memberikan manfaat bagi peneliti karena memberikan data dan fakta pemerintahan Megawati yang berjalan kurang lebih hanya 3 Tahun menjabat. Serta di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kebijakan pemerintah Megawati yang merugikan para pekerja buruh dengan sistem *Outsourcing* yang akan dibahas oleh peneliti di bab 5. Buku ini terdapat juga pembahasan dampak-dampak kebijakan politik pemerintahan Megawati saat menjadi presiden yang dibutuhkan oleh peneliti.

Effendi (2014) dalam bukunya *Kiprah & Pemikiran Politik Tokoh – Tokoh Bangsa* dalam buku ini dijelaskan mengenai biografi, kiprah dan pemikiran politik yang terjadi saat Megawati menjadi presiden. Megawati merupakan putri dari presiden pertama Sukarno dan Fatmawati. Megawati merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Lahir di kampung Ledok Ratmakan, tepi barat Kali Code Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Nama lengkapnya ialah Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri. SD hingga SMA ia tempuh di perguruan Cikini, Jakarta. Megawati semasa kuliah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran tahun 1965-1967 dan Fakultas Psikolog Universitas Indonesia tahun 1970-1972. Karier politik Megawati dimulai tahun 1986 ketika menjabat sebagai wakil ketua cabang Jakarta. Kariernya dalam berpolitik termasuk cepat, satu tahun kemudian ia menjadi perwakilan PDI di parlemen. Pada tahun 1993 dalam kongres luar biasa PDI yang diselenggarakan di Suarabaya, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001 mengangkatnya sebagai presiden menggantikan Abdurrahman Wahid setelah dicabut mandatnya oleh MPR RI. Pada masa pemerintahannya, Megawati banyak melakukan terobosan-terobosan dalam mengeluarkan kebijakannya yang pro-demokrasi, bahwa dalam bidang politik pemerintahan Megawati dinilai mampu meletakkan dasar-dasar demokrasi dengan benar, perjuangan dan cita-cita reformasi mampu diapresiasi

Megawati dalam masa pemerintahannya. Amandemen UUD 45 mampu diselesaikan dengan lancar, pemerintah juga mampu menyeimbangkan kedudukan dan kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu pada masa Megawati pertama kalinya diadakan sistem pemilihan langsung. Masa pemerintahan Megawati mampu menekan jumlah angka kemiskinan dari 18% menjadi 17% pada tahun 2003, dalam bidang ekonomi tingkat inflasi rendah, nilai tukar rupiah stabil, cadangan devisa stabil, serta turunnya suku bunga bank. Pada masa Megawati inilah tonggak demokrasi perlahan mulai ditegakkan, salah satunya dengan kebebasan pers. Megawati memang tidak selihai Sukarno dalam berpolitik. Kemampuan intelektualnya juga tidak sehebat Sukarno, akan tetapi Indonesia tidak hanya butuh pemimpin yang selalu tampak garang di depan publik, Indonesia butuh seorang pemimpin yang memiliki sifat mengayomi, sifat keibuan, dan Megawati mampu menjawab kebutuhan itu.

Setiono, dkk (2000) dalam bukunya *Tragedi Megawati (Revisi Politik Massa di Indonesia)* dalam buku ini dijelaskan mengenai perjalanan dan perjuangan Megawati dalam mencapai kursi presiden. Kiprah Megawati di dunia politik tahun 1987. Diam itu harus berarti emas. Dalam versi Megawati Soekarnoputri, diam bisa berarti strategi menghadapi keruhnya cuaca politik. Dalam pencapaian kesuksesannya, banyak kendala-kendala yang terjadi pada saat itu namun Megawati terus berjuang hingga akhirnya dapat menduduki kursi presiden dan berkuasa di Indonesia. Dimulai dari masalah KKN yang masih belum bisa terselesaikan, kasus-kasus di Ambon, Irian, hingga Aceh yang masih belum dapat ditangani dengan baik oleh Megawati. Kendala-kendala yang paling dominan yaitu adanya campur tangan orde baru yang sangat kontra dengan hadirnya Megawati di kancah perpolitikan Indonesia dan ingin menjatuhkan Megawati. PDI Perjuangan pada saat itu sangat besar dan menjadi primadona. Saat melihat laju perolehan suara PDI Perjuangan yang tidak terkejar, para partai Islam merapatkan barisan dan ingin menjatuhkan PDI Perjuangan pada pemilu tahun 1999. Kenyataan harus diakui, PDI Perjuangan tetap memperoleh suara terbanyak dalam pemilu secara demokratis. Namun karena ada

campur tangan pihak kontra Megawati, akhirnya Gus Dur lah yang menjadi presiden dan Megawati menjadi wakil presiden kala itu. Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden sungguh melegakan bagi kubu PDI Perjuangan terutama masa PDI P yang sempat kecewa. Secara garis besar buku ini sudah menjabarkan dan menjelaskan gambaran umum tentang perjalanan politik Megawati, baik dimulai dari Menjadi kader partai PDI Perjuangan ataupun sejak menjabat sebaai Wakil Presiden, sehingga buku dipakai oleh peneliti sebagai sumber tambahan dalam menyempurkan penelitian, serta dalam buku ini terdapat keterlibatan Megawati dalam dunia politik Indonesia sebelum menjadi presiden sebagai anggota DPR dan Anggota Partai PDI sampai menjadi wakil presiden dari Gus Dur.

Gautama (2000) dalam bukunya *Megawati Soekarnoputri Harapan & tantangan di Kursi Wapres RI* dijelaskan mengenai bagaimana perjuangan dan karir Megawati dalam berpolitik bersama Partai PDI. Dimulai dari pemilu tahun 1999 yang ingin menjatuhkan PDI. Terbukti pada saat itu Gus Dur yang memenangkan kursi presiden, sedangkan Megawati menjabat menjadi wakil presiden. Megawati menjalankan kursi wakil presiden dengan baik. Beliau juga memanfaatkan jabatannya dengan belajar lebih banyak mengenai perpolitikan yang terjadi dan mempelajari bagaimana rakyat Indonesia itu sendiri. Megawati yakin bahwa dia bisa menduduki kursi nomer 1 di Indonesia. Buku ini hampir sama dengan buku lainnya yang fokus pembahasannya perjalanan politik Megawati, sehingga bagi penulis buku ini dijadikan sebagai sumber rujukan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan terkait persamaan dan perbedaan dari tiap-tiap sumber yang membahas mengenai politik Megawati yang akhirnya akan mendapatkan data dan fakta tentang keterlibatan Megawati di dunia Perpolitikan Indonesia sebelum menjadi Presiden.

Hadi (2004) dalam bukunya *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (jilid 1 sampai jilid 7)* menjelaskan mengenai biografi Megawati dari dilahirkan tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Megawati melakukan pendidikan di 2 Universitas yaitu fakultas pertanian di Universitas Padjajaran (1965-1967) dan Fakultas Psikolog Universitas Indonesia (1970-1972). Syamsu Hadi juga memaparkan lika liku

perjuangan Megawati untuk sampai ke kursi presiden. Mulai konflik yang sengaja dibuat oleh Soeharto masa orde baru yang membuat PDI terbelah menjadi dua kubu. Cara yang dilakukan oleh Suharto ini hanya tidak ingin Megawati menjadi Presiden RI saat itu. Serta majunya Megawati sebagai pemimpin PDI-P kala itu yang membuat kubu Surjadi semakin kontra dengan Megawati. Masih Syamsu Hadi (2004) dalam bukunya *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (jilid 8)* menjelaskan peran Megawati saat menjadi presiden. Bagaimana perjuangan Megawati untuk memperbaiki dan lebih memajukan negara Indonesia. Banyak masalah-masalah yang terjadi yang diwariskan oleh Presiden sebelumnya. Dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta masih banyak yang lainnya. Ada keistimewaan dalam buku ini karena di dalamnya membagi-bagi perjalanan kehidupan Megawati dari kecil, keluarga Soekarno, pendidikan, dan perjalanan politik. Pembagian tersebut juga dipecah dalam jilid 1-8 sehingga sedikit memudahkan bagi peneliti untuk mencari data dan fakta terkait biografi hidup dan perjalanan politik Megawati, serta bagi peneliti sendiri buku ini menjadi tambahan referensi untuk melengkapi data penelitian skripsi.

Dari uraian di atas dapat diambil penjelasan bahwa Megawati merupakan sosok pemimpin Indonesia yang disenangi oleh rakyat sebab pemikiran politik Megawati yang memandang rakyat sama itu yang membuat rakyat Indonesia senang dengan beliau. Pasca Megawati menjabat menjadi presiden tahun 2001-2004 banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan Megawati. Sedangkan posisi penelitian ini sebagai penelitian baru terkait peran serta Megawati di dunia perpolitikan Indonesia sebelum menjadi Presiden, dan Kebijakan Politik Megawati baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai Presiden ke-Lima Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dalam hal kebijakan politik Megawati selama menjabat menjadi Presiden tahun 2001-2004. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi politik.

Pendekatan sosiologi politik ini mengkaji ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam sebuah lapisan masyarakat dan masyarakat nasional. Objek pendekatan sosiologi politik menganalisis kekuasaan di dalam masyarakat secara menyeluruh yang mencakup konflik antar individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Dasar sosiologi politik ialah menegakkan ketertiban sosial (Duverger, 1998:18-29). Pendekatan sosiologi politik ini dilandasi pemikiran bahwa seorang pemimpin bukan hanya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam suatu tujuan negara. Tanpa masyarakat, tujuan untuk memajukan negara tidak akan dapat tercapai. Pemakaian pendekatan sosiologi politik dapat membantu penulis mengetahui sejauh mana seseorang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial (Budiardjo, 2003:20). Sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua lapisan masyarakat, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Pengertian tersebut pada dasarnya membedakan antara pemerintah dengan yang diperintah. Di dalam suatu kelompok manusia terdapat orang yang memerintah dan orang yang mematuhi, terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang menaati keputusan tersebut. Ilmu sosiologi politik adalah gabungan antara ilmu sosial dan politik yang berfokus pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dimana pemerintah lebih berperan untuk mengatur masyarakat melalui lembaga pemerintahannya.

Pendekatan sosiologi politik ditujukan kepada para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan yang langsung menentukan perkembangan politik serta jalannya pemerintahan dalam suatu masyarakat. Pendekatan sosiologi politik dalam penelitian ini digunakan untuk dapat melihat perkembangan jalannya kebijakan yang dilakukan oleh Megawati. Menurut peneliti pendekatan sosiologi politik sangat cocok dalam pengambilan kebijakan politik presiden Megawati tahun 2001-2004.

Selanjutnya untuk mempertajam hasil analisis dengan pendekatan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menggunakan teori pembuat kebijakan Laswell (dalam Syafie, 1992:35) mengemukakan sebagai suatu program yang diproyeksikan

dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Pembuatan kebijakan dalam analisa politik lebih mengarah pada proses pembuatan keputusan. Menurutnya suatu keputusan merupakan hasil dari suatu pertentangan yang membentuk kekuasaan atau merupakan hasil dari interaksi dalam arena politik. Teori ini digunakan dalam menganalisis kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya pada masa Megawati, dimana pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan politik.

Ada 2 akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang *Berorientasi Pada Pelayanan Public* dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang *Meracuni Public*/ kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; *Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka Intervensi Terhadap Ekonomi/Social Masyarakat*. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah. Teori kekuasaan ini digunakan dalam menganalisis mengenai apa saja kebijakan penguasa yang terjadi di Indonesia ketika Megawati menjadi presiden sehingga bisa membuat perubahan dalam tatanan masyarakat Indonesia tahun 2001–2004.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau (Gottschalk, 1986:32). Metode penelitian sejarah adalah prosedur dari sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak – jejak itu termuat dalam sumber sejarah (Notosusanto, 1917:17). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan jawaban berupa kesimpulan dari suatu persoalan dengan menggunakan metode – metode sejarah yang ada. Metode sejarah yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi. Berikut akan penulis jelaskan ke-4 langkah metode penelitian sejarah dalam skripsi ini :

3.1 Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti mencari sumber – sumber sampai mendapatkan data. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama penelitian karena dibuat pada saat kejadian itu ada. Sedangkan sumber sekunder sumber pendukung dari sumber primer. Tidak dibuat pada masa adanya suatu kejadian. Sumber primer yang dimaksud berupa buku-buku pokok tentang presiden Megawati yang dibuat pada tahun yang sama yaitu antara tahun 2001 – 2004. Sedangkan sumber sekunder adalah buku – buku yang menunjang tentang pembahasan skripsi yang dilakukan peneliti. Sebelum melakukan penelitian, pertama – tama peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan dengan mencari skripsi yang berhubungan dengan pembahasan dan

mencari informasi di internet yang kemudian dilanjutkan dengan membaca buku – buku pokok tentang Megawati dan politiknya saat menjadi Presiden Indonesia. Peneliti menggunakan sumber pendukung tentang penelitian ini yang dibuat pada tahun tersebut. Sumber itu diantaranya karya Tjahjo Kumolo,dkk (2004) yang berjudul “*Megawati Soekarnoputri Presiden Pilihan Rakyat*” dan karya Syamsu Hadi (2004) yang berjudul “*Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Jilid 1 – Jilid 9)*”.

Sumber sekunder merupakan sumber tertulis yang mendukung dan masuk ke dalam pembahasan skripsi ini yang relevan. Sumber sekunder biasanya ditulis oleh penulis profesional meskipun tidak terlibat langsung dalam kejadian tersebut. Sumber sekunder yang peneliti dapatkan diantaranya karya Ade Ma’ruf dengan judul “*Megawati Soekarnoputri Riwayat Pribadi dan Politik Putri Bung Karno*”, karya Sulaiman Effendi dengan judul “*Kiprah & Pemikiran Politik Tokoh – Tokoh Bangsa*”, karya Agustina Soebacman dengan judul “*Spirit 7 Presiden RI*”, karya Tempo dengan judul “*Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia*”, karya Sidarta Gautama dengan judul “*Megawati Soekarnoputri Harapan&Tantangan di Kursi Wapres R.I*”, karya Ahmad Bahar yang berjudul “*Tragedi Megawati*”, karya Floriberta Aning dengan judul “*Perang RI I*”, karya Andi Setiono,dkk dengan judul “*Megawati Soekarniputri 1993 – 1996*”. Sumber – sumber tersebut di dapat dari perpustakaan daerah Jember serta toko buku baik secara langsung maupun online.

3.2 Kritik

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ini kritik. Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder dilakukan kritik. (Sjamsudin, 1996:104). Kritik juga digunakan penulis dalam pengujian sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibel keasliannya Pada langkah kritik ini ada dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah sumber yang digunakan dalam penelitian ini asli

atau tidak. Langkah yang dilakukan adalah dengan melihat sampul, tahun terbit, pengarang, judul, serta latar belakang.

Setelah kritik ekstern selanjutnya yaitu kritik intern. Kritik intern yaitu tahap untuk mendapatkan informasi yang terdapat di dalam buku yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini dilakukan penilaian secara kritis sumber – sumber yang telah didapat dengan cara membandingkan persamaan ataupun perbedaan beberapa penafsiran dari buku-buku yang diperoleh dari setiap data. Dengan adanya kritik intern ini penulis bisa mengetahui apakah sumber yang digunakan tersebut sudah bisa menjadi fakta sejarah. Seperti halnya dalam buku *Spirit 7 Presiden RI* yang ditulis oleh Agustina Soebachman tahun 2015 yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Syura Media Utama. Melalui kritik ekstern, penulis menentukan kredibilitas dan reabilitas buku ini apakah sesuai dan tidak menyimpang dengan pembahasan peneliti. Setelah mengkaji sumber yang ada penulis dapat menemukan data-data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian mengenai kebijakan politik presiden Megawati tahun 2001-2004 serta dampak yang ditimbulkan.

3.3 Interpretasi

Langkah selanjutnya yang melakukan interpretasi, data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Interpretasi merupakan proses menghubungkan – hubungkan atau mengkait-kaitkan fakta sejarah yang telah diwujudkan satu sama lainnya sehingga menjadi rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan keserasian antara satu dengan lainnya (Hariyono, 1995:110). Fakta – fakta sejarah harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yaitu dengan cara menyeleksi, menyusun data, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta.

Kegiatan interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap fakta – fakta yang ada untuk menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta satu dengan yang lainnya yang telah terhimpun dan berhubungan dengan kebijakan politik saat Megawati menjadi presiden pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Setelah itu

dirangkai dan disusun dengan kronologis menjadi suatu peristiwa, sehingga dapat diperoleh suatu kisah sejarah atau cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya. Kegiatan interpretasi ini terbagi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisa yaitu menguraikan data-data yang telah diperoleh selama ini terkait dengan kebijakan politik presiden Megawati tahun 2001-2004, sedangkan sintesis yaitu menghubungkan atau menyatukan data-data yang telah diperoleh sehingga ditemukan fakta sejarah (Kuntowijoyo, 2013:78).

Penulis dalam hal ini melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah terkumpul untuk dirangkai dan dihubungkan menjadi bentuk yang logis, rasional, dan objektif. Fakta itu kemudian disusun secara kronologis sehingga didapat suatu cerita sejarah yang realistis mengenai kebijakan politik presiden Megawati tahun 2001 – 2004.

3.4 Historiografi

Langkah terakhir peneliti melakukan historiografi/penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Gottschalk (1986:32) historiografi merupakan kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Dapat dikatakan bahwa metode historiografi merupakan metode puncak dari rangkaian kerja seorang peneliti, dari tahap inilah dapat diketahui baik buruk hasil kerja secara keseluruhan.

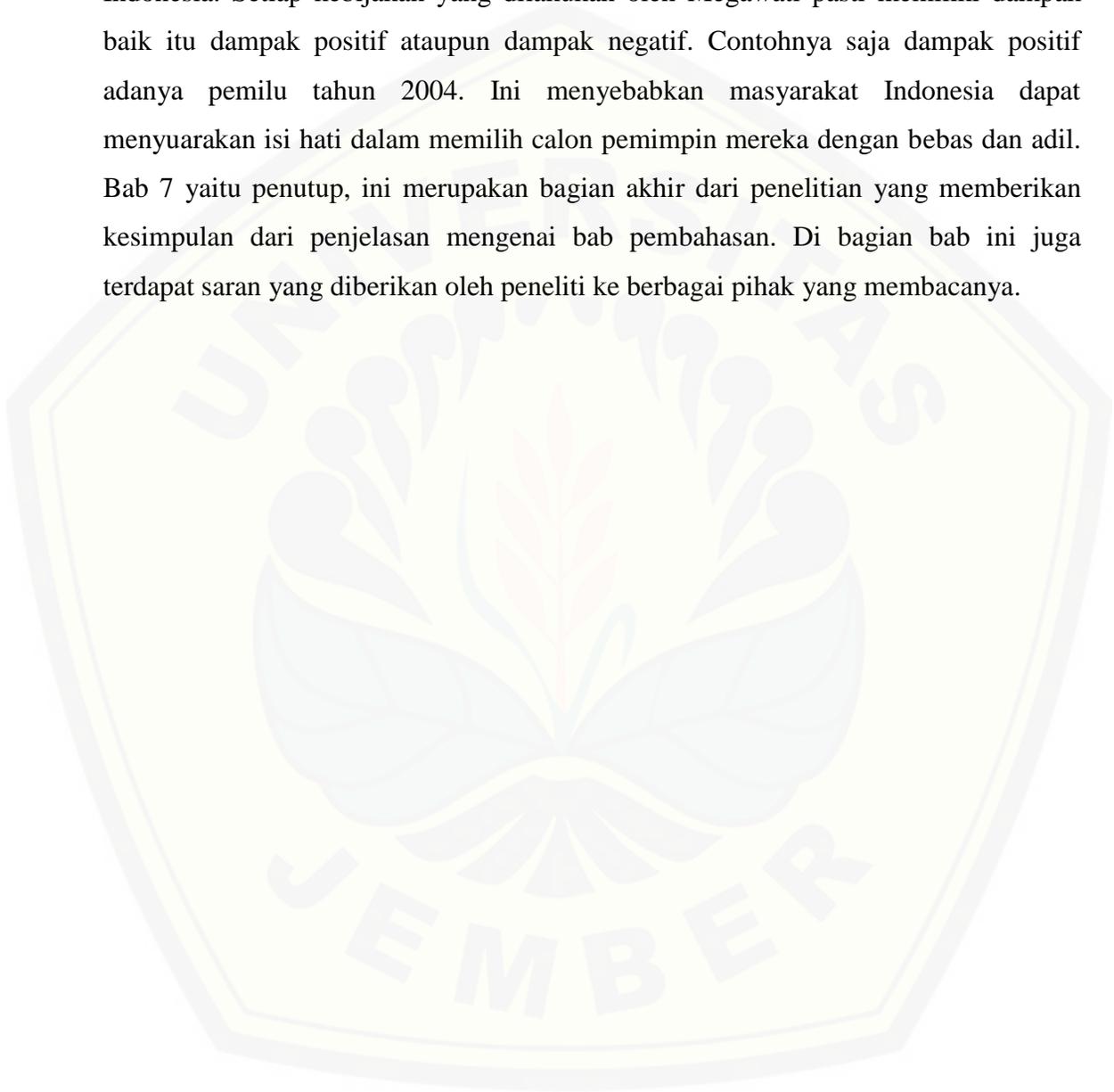
Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kemampuan menampilkan kejelasan serta kerapian ekspresi penulisan sehingga fakta sejarah dapat dirangkai secara kronologis dan sistematis sehingga menjadi kisah sejarah yang bermakna. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti menuliskan cerita sejarah tentang kebijakan politik yang terjadi di Indonesia ketika Megawati menjabat sebagai Presiden tahun 2001 sampai tahun 2004 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional, logis, dan objektif. Kemudian menyusun sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis serta dapat diyakini kebenarannya.

Susunan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang menyangkut latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi pendapat dan buku-buku serta sumber-sumber sejarah lainnya mengenai kebijakan politik presiden Megawati tahun 2001-2004, serta teori yang cocok terhadap penelitian dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah skripsi ini, yang terdiri dari empat tahap metode penelitian yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Bab ini dipaparkan dan dijelaskan mengenai cara – cara yang digunakan peneliti dalam hal mengumpulkan sumber, data, dan merekonstruksi fakta sejarah yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh, kronologis, sistematis, serta rasional.

Hasil penelitian dijelaskan pada bab 4, 5, dan 6. Bab 4 penulis memaparkan tentang keterlibatan Megawati dalam perpolitikan Indonesia sebelum tahun 2001. Dimulai dari keterlibatan Megawati dalam perpolitikan tahun 1986 sehingga Megawati terpilih menjadi ketua DPC PDI di Jakarta, sampai menjadi ketua umum PDI sehingga konflik dengan kubu Surjadi yang juga ingin menguasai PDI. Pada akhirnya PDI terpecah menjadi dua dan Megawati mendirikan PDI-P sebagai ketua umumnya. Setelah itu tahun 1997 Megawati mencalonkan diri menjadi presiden namun dapat dikalahkan oleh Gus Dur sehingga Megawati hanya bisa menjadi wakil presiden RI.

Pada Bab 5 menjelaskan mengenai kebijakan politik pemerintahan Megawati tahun 2001-2004. Kebijakan-kebijakan apa saja yang Megawati lakukan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Penulis disini lebih memfokuskan pada kebijakan politik luar dan dalam negeri yang Megawati lakukan. Dimulai dari kebijakan politik kerjasama antar negara yang dilakukan Megawati sampai kebijakan politik dalam negeri dengan adanya pemilu secara demokrasi untuk pertama kali.

Bab 6 menjelaskan tentang dampak kebijakan politik pemerintahan Megawati tahun 2001-2004. Dimulai dari dampak bagi aspek sosial, ekonomi, serta politik di Indonesia. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh Megawati pasti memiliki dampak baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Contohnya saja dampak positif adanya pemilu tahun 2004. Ini menyebabkan masyarakat Indonesia dapat menyuarakan isi hati dalam memilih calon pemimpin mereka dengan bebas dan adil. Bab 7 yaitu penutup, ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memberikan kesimpulan dari penjelasan mengenai bab pembahasan. Di bagian bab ini juga terdapat saran yang diberikan oleh peneliti ke berbagai pihak yang membacanya.



BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Dari uraian yang penulis sampaikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perjalanan politik praktis yang dilakukan oleh Megawati dimulai dengan menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di cabang Jakarta Pusat, memang langkah politik praktis ini telah melanggar kesepakatan bersama keluarga Bung Karno yang tidak akan ikut andil lagi dalam perpolitikan Indonesia dan akan menjadi pihak yang terbuka bagi semua golongan. Perjalanan politik Megawati terus berjalan dan terus meningkat, salah satunya adalah perebutan kursi Presiden Republik Indonesia untuk masa bhakti 1999-2004, tetapi pada masa ini Megawati harus mengalami kekalahan dari rival terkuat partai poros tengah yang mengusung Abdurrahman Wahid, sehingga menjadikan Megawati sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang ke-8.

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Megawati sebagai presiden Republik Indonesia yang ke-5 meliputi 2 hal, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Untuk kebijakan politik dalam negeri meliputi, stabilisasi keamanan Indonesia dari teror bom, pembentukan lembaga hukum tindak pidana korupsi yang meliputi badan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sedangkan di bidang ekonomi lebih kepada memanjakan pengusaha asing dengan mengobral dan menjual murah aset negara milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti penjualan Indosat dll. Dan pada masa Megawati inilah sistem *outsourcing* diberlakukan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi para buruh seluruh Indonesia. Sedangkan untuk kebijakan politik luar negeri Megawati adalah melaksanakan politik aktif bebas Indonesia dengan cara melakukan diplomasi dan persahabatan dengan negara-negara lain, seperti Korea Utara dan Korea Selatan yang selama ini selalu bertikai, dan yang paling penting adalah Indonesia mengutuk dan mengambil sikap tidak mendukung terhadap agresi militer Amerika Serikat di Irak.

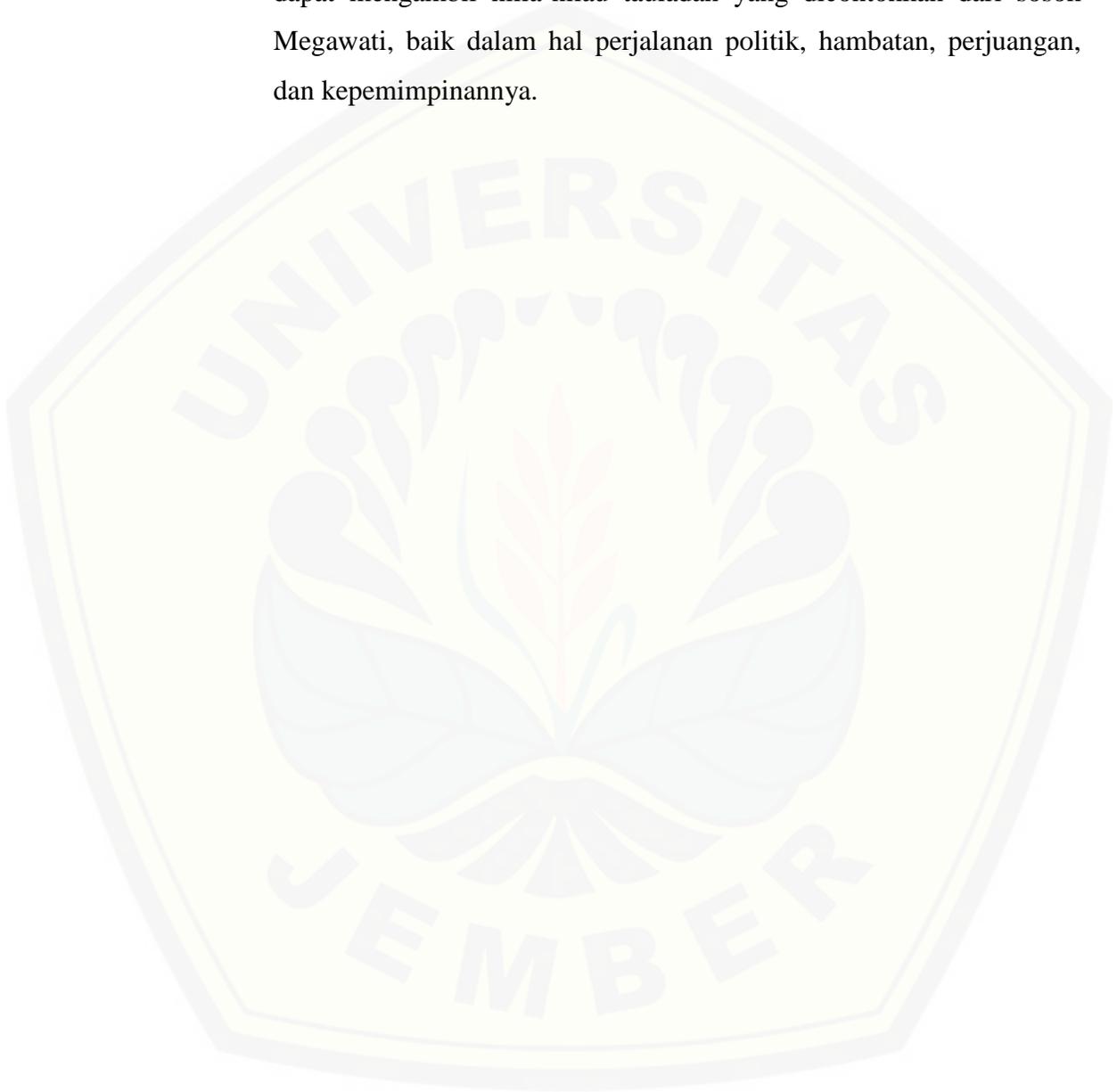
Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Megawati meliputi dampak di bidang Ekonomi, Sosial dan Politik. Dampak secara umum di bidang ekonomi adalah masih melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang berkisaran di angka Rp. 9.350/ 1\$, serta meningkatnya angka inflasi yang terjadi karena sebagian perusahaan milik negara (BUMN) yang menjadi aset bangsa dijual kepada pihak asing dengan harga yang murah. Di bidang sosial, masih terjadi benturan antar etnis dan beberapa kelompok kepentingan yang terus memperlambat kinerja pemerintahan presiden Megawati dengan beberapa teror bom di beberapa tempat. Serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi, hal tersebut terjadi karena tingkat Korupsi (KKN) di negara Indonesia dibawah kepemimpinan Megawati masih sangat tinggi dan cenderung semakin meluas. Sehingga berakibat pada kebocoran anggaran negara dan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Megawati. Sedangkan di bidang Politik memiliki dampak terpecahnya koalisi partai besar menjadi tiga, yaitu koalisi partai Pemerintah dibawah partai PDI Perjuangan, Poros tengah meliputi partai-partai Islam, dan netral yang meliputi partai-partai kecil yang tidak memihak pada 2 golongan sebelumnya.

7.2 Saran

Ada beberapa saran yang akan penulis berikan kepada para pembaca, di antaranya :

- 1) Kepada para Mahasiswa calon guru sejarah, Penelitian ini diharapkan dapat mengasah dan memahami secara mendalam mengenai perjalanan Politik Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004.
- 2) Kepada almamater, hendaknya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian, terutama yang berada di wilayah sendiri, sehingga akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara.

- 3) Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perjalanan politik praktis Megawati Soekarnoputri, dan dapat mengambil nilia-nilau tauladan yang dicontohkan dari sosok Megawati, baik dalam hal perjalanan politik, hambatan, perjuangan, dan kepemimpinannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aning, F. 2008. *Perang RI I*. Yogyakarta : Navila Idea
- Arikunto, S. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bahar, Ahmad. 1996. *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993 – 1996*. Yogyakarta : PT. Pena Cendekia
- Budiardjo, M. 2003. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Depdikbud. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Duverger. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Effendi, S. 2014. *Kiprah&Pemikiran Politik Tokoh – Tokoh Bangsa*. Yogyakarta : IRCiSoD
- Gautama, Sidarta. 2000. *Megawati Soekarnoputri Harapan dan Tantangan di Kursi Wapres R.I*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Gie, Kwik Kian. 2004. *Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF*. Jakarta: Granit.
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah : Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Masa Kecil di Pengungsian)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Dalam Bimbingan Bung Karno)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Di Tengah Perebutan Kekuasaan)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Tegar Menghadapi Musibah)*. Jakarta : Pustaka Simponi

- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Menempa Diri di Kebagusan)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Melawan Politik Orde Baru)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Diganjal Di Puncak Kemenangan)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Menyelamatkan Kapal Yang Nyaris Runtuh)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Mengantar Ke Masa Depan)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Kartodirdjo, S. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia
- Kumolo, dkk. 2004. *Megawati Soekarnoputri Presiden Pilihan Rakyat*. Jakarta : Global Publika
- Lesmana, Irfandi. 2002. *Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Simponi.
- Mariana, Dede. 2008. *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal di Indonesia*. Bandung : APII
- Majalah, 2001. *Panji Masyarakat; Mega Segera –Penentanginya Kini Balik Mendukung-*, Jakarta: Mingguan Berita dan Investogasi
- Mashad, D. 1999. *Korupsi Politik, Pemilu&Legitimasi Pasca Orde Baru*. Jakarta : PT Pustaka Cidesindo
- Ma'ruf, Ade. 2013. *Megawati Soekarnoputri Riwayat Pribadi Dan Politik Putri Bung Karno*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Puspoyo, W. 2012. *Dari Soekarno hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955 – 2009*. Solo : PT Era Adicitra Intermedia
- Setiono, dkk. 2000. *Tragedi Megawati Revisi Politik Massa di Indonesia*. Yogyakarta : Tarawang

- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
- Soebachman, A. 2015. *Spirit 7 Presiden RI*. Yogyakarta : Syura Media Utama
- Soerjono, Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sudarmanto, B. 2009. *Benarkah Megawati Tak Punya Nyali? Fakta Di Balik Perang Melawan Korupsi*. Penerbit Yayasan Mitra Insani
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Surabaya : Grasindo
- Syafie, K. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Universitas Pres
- Zulkifli, dkk. 2010. *Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia

LAMPIRAN A

MATRIKS PENELITIAN

Topik	Judul	Permasalahan	Jenis dan Sifat penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
Sejarah Politik Indonesia	Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2000-2004	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana Megawati dalam panggung politik Indonesia sebelum tahun 2001 ? 2) Bagaimana kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri pemerintahan Megawati tahun 2001-2004 3) Bagaimana dampak kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri pemerintahan Megawati tahun 2001-2004 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis Penelitian : Penelitian Sejarah 2) Sifat Penelitian : Studi Pustaka dan Literatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Buku 2) Skripsi 3) Internet 4) Majalah 5) Koran 6) Arsip 7) Dokumen 	<p>Metode Penelitian Sejarah. Dengan langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Heuristik 2) Kritik 3) Interpretasi 4) Historiografi

LAMPIRAN B. PROFIL MEGAWATI

Megawati Soekarnoputri**Presiden Indonesia ke-5****Masa jabatan**

23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004

**Wakil
Presiden**Hamzah Haz**Wakil Presiden Indonesia ke-8****Masa jabatan**

20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001

PresidenAbdurrahman Wahid**Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P)****Petahana****Mulai menjabat**

1999

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI)**Masa jabatan**

22 Januari 1993 – 27 Juli 1996

**Didahului
oleh**Soerjadi**Digantikan
oleh**Soerjadi**Informasi pribadi**

Lahir Dyah Permata Megawati Setyawati
Sukarnoputri
[23 Januari 1947](#) (umur 70)
 [Yogyakarta, Indonesia](#)

Kebangsaan  [Indonesia](#)

Partai politik  [PDI](#) (1986–96)
 [PDI-P](#) (1999–)

Suami/istri [Surindro Supjarso](#)
(1968-1971; alm.)
Hassan Gamal A. Hasan
(1972; dibatalkan oleh [PTA](#))
[Taufiq Kiemas](#)
(1973-2013; alm.)

Relasi [Soekarno](#) (ayah)

Anak Mohammad Rizki Pratama
Mohammad Prananda
(dari [Surindro Supjarso](#))
[Puan Maharani](#)
(dari [Taufiq Kiemas](#))

Orangtua [Soekarno](#) dan [Fatmawati](#)

Agama [Islam](#)

Tanda tangan 

LAMPIRAN C. KABINET PERSATUAN NASIONAL PEMERINTAHAN**PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID****WAKIL PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Ketika dibentuk pertama kali, Kabinet Persatuan Nasional terdiri dari:

Menko Polkam Jenderal Wiranto

Menko Ekuin Kwik Kian Gie

Menko Kesra Hamzah Haz

Menteri Dalam Negeri Letjen Suryadi Sudirja

Menteri Luar Negeri Alwi Shihab

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono

Menteri Hukum dan Perundangan Yusril Ihza Mahendra

Menteri Keuangan Bambang Sudibyo

Menteri Pertambangan dan Energi Letjen Susilo Bambang Yudhoyono

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla

Menteri Pertanian M. Prakosa

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail

Menteri Transportasi Letjen Agum Gumelar

Menteri Kelautan Sarwono Kusumaatmaja

Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu

Menteri Kesehatan Achmad Sujudi

Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin

Menteri Agama Tolchah Hasan

Menteri Pemukiman dan Pembangunan Daerah Erna Witoelar

Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam

Menteri Negara Koperasi dan UKM Zarkasih Nur

Menteri Negara Lingkungan Hidup Soni Keraf

Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid

Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Hidayat Jaelani

Menteri Negara Investasi dan BUMN Laksamana Sukardi
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kofifah Indar Parawansa
Menteri Negara Perkejaan Umum Rafiq Budiro Sucipto
Menteri Negara HAM Hasballah M. Saad
Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan Al Hilal Hamdi
Menteri Negara Reformasi Administrasi Freddy Numberi
Menteri Negara Urusan Umum AA Gde Agung
Panglima TNI Laksamana Widodo AS
Jaksa Agung Marzuki Darusman
Sekretaris Negara Ali Rahman

Sebulan kemudian, 26 November 1999, Hamzah Haz mengundurkan diri dan digantikan oleh Basri Hasanuddin sebagai Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan. Tanggal 4 Januari 2000 giliran Ali Rahman mengundurkan diri dan diganti oleh Bondan Gunawan. Sebulan kemudian, Wiranto digantikan oleh Suryadi Sudirja yang merangkap jabatan sebagai Mendagri. Tanggal 24 April 2000 Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi terpeleceh dari kabinet. Masing-masing digantikan oleh Luhut Panjaitan dan Rozi Munir. Tanggal 29 Mei 2000, Bondan Gunawan yang baru bertugas selama empat bulan keluar. Dia digantikan oleh Djohan Effendi.

Setelah agak tenang selama tiga bulan, tanggal 10 Agustus 2000 Kwik Kian Gie mengundurkan diri dari posisi Menko Ekuin. Setelah pengunduran diri Kwik Kian Gie, barulah Gus Dur secara resmi merombak kabinetnya. Tanggal 23 Agustus 2000 Gus Dur mengumumkan perubahan susunan kabinet. Beberapa nama baru masuk, dan beberapa kementerian digabungkan.

Menko Polkam Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono
Menko Ekuin Rizal Ramli
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Letjen Suyardi Sudirja
Menteri Luar Negeri Alwi Shihab
Menteri Pertahanan Mahfud MD
Menteri Keuangan Priyadi Prapto Suhardjo

Menteri Agama Tolchah Hasan

Menteri Pertanian dan Kehutanan Bungaran Saragih

Menteri Pendidikan Yahya Muhaimin

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Achmad Sujudi

Menteri Transportasi dan Komunikasi Letjen Agum Gumelar

Menteri Tenaga Kerja Al Hilal Hamdi

Menteri Industri dan Perdagangan Luhut Panjaitan

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Purnomo Yusgiantoro

Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra

Menteri Pemukiman dan Pembangunan Daerah Erna Witoelar

Menteri Budaya dan Pariwisata I Gde Ardika

Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmaja

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN Khofifar Indah Parawansa

Menteri Negara Reformasi Administrasi Ryaas Rasyid

Menteri Negara Koperasi dan UKM Zarkasih Nur

Menteri Negara Lingkungan Hidup Soni Keraf

Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam

Menteri Muda Kehutanan Nurmahmudi Ismail

Menteri Muda Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisiepo

Menteri Muda Restrukturisasi Perekonomian Nasional Cacuk Sudarjanto

Panglima TNI Laksamana Widodo AS

Jaksa Agung Marzuki Darusman

Kabinet hasil reshuffle pertama ini pun tidak bertahan lama. Pada tanggal 3 Januari 2001 Ryass Rasyid mengundurkan diri dan tidak pernah digantikan. Sebulan kemudian, 7 Februari giliran Yusril Ihza Mahendra yang mengundurkan diri dan digantikan Baharuddin Lopa. Sebulan kemudian, 15 Maret 2001 Nurmahmudi Ismail digantikan dengan Marzuki Usman.

Tanggal 1 Juni 2001 Gus Dur kembali mengocok ulang kabinetnya menyusul konflik politik yang semakin keras dengan lawan-lawannya di parlemen. Agum Gumelar menggantikan SBY sebagai Menko Polkam. Lalu Budi Mulyawan S ditunjuk sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi yang ditinggalkan Agum. Jaksa Agung Marzuki Darusman pun digantikan dengan Baharuddin Lopa. Sementara Marsillam Simanjuntak ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM. Sarwono Kusumaatmaja digantikan Rohmin Dauri sebagai Menteri Negara Kelautan dan Perikanan. Adapun Posisi Menteri Muda Restrukturisasi Ekonomi Nasional dibubarkan.

Hanya bertahan kurang dari dua minggu. Pada 12 Juni 2001 Gus Dur kembali mengumumkan perubahan kabinet. Kali ini Rizal Ramli menggantikan Prijadi Prpto Suhardjo sebagai Menteri Keuangan. Adapun Burhanuddin Abdullah kemudian masuk untuk menempati posisi Menko Ekuin yang ditinggalkan Rizal. Anwar Supriyadi ditunjuk sebagai Menteri Negara Reformasi Administrasi. Menyusul perubahan ketiga ini, tanggal 5 Juli 2001 Marzuki Darusman ditunjuk sebagai Sekeretaris Kabinet.

Tanggal 10 Juli 2001 Gus Dur mengumumkan kocok ulang keempat setelah Baharuddin Lopa meninggal dunia. Sebagai pengganti Lopa, Gus Dur menunjuk Marsillam Simanjuntak. Adapun Mahfud MD ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM. Adapun Agum memegang dua posisi penting, Menko Polkam dan Menteri Pertahanan.

LAMPIRN C1. KABINET GOTONG ROYONG PEMERINTAHAN**PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI****WAKIL PRESIDEN HAMZAH HAZ**

Berikut susunan anggota Kabinet Gotong Royong

Menko Polsoskam : Susilo Bambang Yudhoyono

Tempat/tanggal lahir : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949

Jabatan terakhir : Menko Polsoskam (Kabinet Persatuan Nasional)

Menteri Dalam Negeri : Hari Sabarno

Tempat/tanggal lahir : Solo, 12 Agustus 1944

Jabatan terakhir: Wakil Ketua MPR-RI

Menteri Luar Negeri : Hasan Wirayudha

Tempat/tanggal lahir:

Jabatan terakhir: Dirjen Politik Departemen Luar Negeri.

Menteri Pertahanan: Matori Abdul Djali

Tempat/tanggal lahir : Salatiga, Jawa Tengah, 11 Juli 1942.

Jabatan terakhir: Wakil Ketua MPR-RI

Menteri Kehakiman & HAM : Yusril Ihza Mahendra

Tempat/tanggal lahir : Belitung, Sumatra Selatan, 5 Februari 1956

Jabatan terakhir: Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Persatuan Nasional)

Menko Perekonomian : Dorodjatun Kuncoro Jakti

Tempat/tanggal lahir : Rangkasbitung, Jawa Barat, 25 November 1939

Jabatan terakhir: Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat

Menteri Keuangan : Boediono

Tempat/tanggal lahir : Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943

Jabatan terakhir: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas (Kabinet Reformasi Pembangunan, Sejak 23 Mei 1998)

Menteri Energi dan SDM: Purnomo Yusgiantoro

Tempat/tanggal lahir : Semarang, Jateng, 16 Juni 1951

Jabatan terakhir: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri Perindag: Rini Soewandi

Tempat/tanggal lahir: Maryland, Amerika Serikat, 1957

Jabatan terakhir: Wakil Kepala BPPN (1998-1999) dan Komisaris Agrakom (2000)

Menteri Pertanian: Bungaran Saragih

Tempat/tanggal lahir: Pematang Siantar, Sumatra Utara, 17 April 1945

Jabatan terakhir: Menteri Pertanian

Menteri Kehutanan: M. Prakosa

Tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 4 Maret 1960

Jabatan Terakhir: Menteri Pertanian

Menteri Perhubungan : Agum Gumelar

Tempat/tanggal lahir: Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Desember 1945.

Jabatan terakhir: Menko Polsoskam

Menteri Kelautan & Perikanan: Rochimin Dahuri

Tempat/tanggal lahir: Babakan, Cirebon, 16 November 1958

Jabatan terakhir: Menteri Kelautan & Perikanan

Menteri BUMN: Laksamana Sukardi

Tempat/tanggal Lahir: Jakarta, 1 Oktober 1956

Jabatan terakhir: Menteri Pendayagunaan BUMN (Persatuan Nasional)

Menko Kesra: Yusuf Kalla

Tempat/tanggal lahir: Watampone, Sulsel, 15 Mei 1942

Jabatan terakhir: Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Persatuan Nasional)

Menteri Tenaga Kerja: Jacob Nuwawea

Tempat/tanggal lahir: Flores, 14 April 1944

Jabatan terakhir: Anggota Fraksi PDI-P/Ketua SPSI

Menteri Sosial: Bachtiar Chamsyah

Tempat/tanggal lahir : Sigli, Aceh, 31 Desember 1945

Jabatan terakhir: Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan DPR

Menteri Kesehatan: Ahmad Sujudi

Tempat/tanggal lahir: Bondowoso, Jawa Timur, 11 April 1941

Jabatan terakhir: Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Menteri Pendidikan Nasional: Malik Fadjar

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Februari 1939

Jabatan terakhir: Menteri Agama

Menteri Agama: Said Aqil Munawar

Tempat/tanggal lahir: Palembang, 26 Januari 1954

Jabatan terakhir: Direktur Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menteri Pemukiman & Pras-wil: Soenarno

Tempat/tanggal lahir: Purwodadi, 19 Mei 1942

Jabatan terakhir: Dirjen Pengembangan Pedesaan Menkimpraswil

Menteri Riset & Teknologi: Hatta Radjasa

Tempat/tanggal lahir: Palembang, Sumatra Selatan, 18 Desember 1953

Jabatan terakhir : Ketua Fraksi Reformasi DPR

Menteri Koperasi & UKM: Ali Marwan Hanan

Tempat/tanggal lahir: Ogan Komering Ulu, 12 Maret 1947

Jabatan terakhir: Ketua Fraksi PPP DPR

Meneg Lingkungan Hidup: Nabiel Makarim

Tempat/tanggal lahir:

Jabatan terakhir: Deputi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Meneg Pemberdayaan Perempuan : Sri Redjeki

Tempat/tanggal lahir: Solo, 10 Oktober 1950

Jabatan terakhir: Anggota DPR dari Partai Golkar

Menteri Negara PAN: Faisal Tamin

Tempat/tanggal lahir: Dompu, Sumbawa, 15 Juni 1941

Jabatan terakhir: Ketua Korpri

Menteri Pariwisata : I Gde Ardika

Tempat/tanggal lahir:

Jabatan terakhir: Menteri Pariwisata dan Kebudayaan

Menteri Informasi & Telekomunikasi : Syamsul Muarif

Tempat/tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 8 Desember 1948

Jabatan terakhir: Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI

Menteri Percepatan KIT : Manuel Kaisiepo

Tempat/tanggal lahir: Biak, Irian Jaya, 25 Desember 1953.

Jabatan terakhir: Menteri Percepatan Kawasan Indonesia Timur

Ka Bappenas: Kwik Kian Gie

Tempat/tanggal lahir: Juwana, Jateng, 11 Januari 1935

Jabatan terakhir: Menko Perekonomian (Persatuan Nasional)

Sekretaris Negara/Kabinet : Bambang Kesowo

Tempat/tanggal lahir: Sragen, 27 Maret 1945

Jabatan terakhir: Sekretaris Wakil Presiden

Ka BAKIN : Hendropriyono

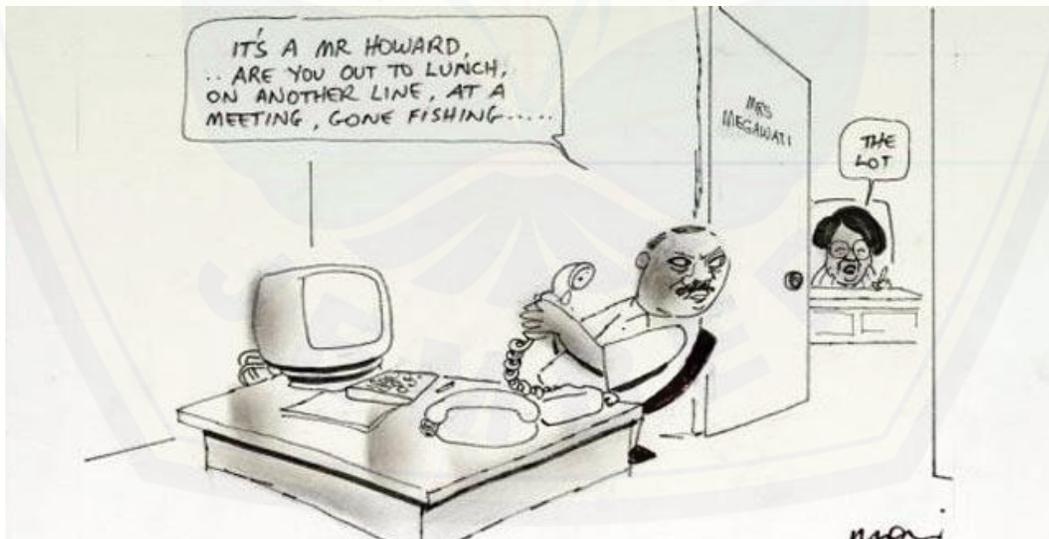
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 7 Mei 1945.

Jabatan terakhir: Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan

LAMPIRAN D. KARIKATUR PRESIDEN MEGAWATI



Sumber : http://reosambodo.blogspot.com/p/karikatur_6.html



<http://darmintopapers.blogspot.com/2004/04/megawati-dan-kartunis.gtml>



<http://1fobol4.blogspot.com/2014/06/perilaku-unik-lucu-aneh-dari-pada.html>



Keterangan Gambar: Salah satu karikatur tentang Proses “Melengserkan” Abdur Rahman Wahid dari Kursi Kepresidenan.



Keterangan Gambar: Salah satu isi Majalah tentang Proses “Naiknya” Megawati dari Wakil Presiden menjadi Presiden.



Keterangan Gambar: Salah satu isi Majalah tentang Proses “Perjalanan” Politik Megawati dari Wakil Presiden menjadi Presiden.

PANJI UTAMA

Pasang Surut Megawati



Terpilih sebagai Ketua PDI
Pada 22 Desember 1993 Megawati dipilih peserta Munas dan disetujui pemerintah menjadi ketua umum PDI setelah kekalahannya berlutur-lurut. Ini terjadi setelah ada upaya penubangan terhadap Soerjadi di Kongres Medan, KLB di Surabaya yang deadlock, hingga Munas PDI di Jakarta. PDI diramalkan bakal menjadi partai besar. Megawati kemudian akrab dengan Abdurrahman Wahid dan banyak melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren NU.

Kudeta Soerjadi
Dengan rekayasa serta bantuan dana dari pemerintah dan ABRI, kepemimpinan Megawati dilrebut Soerjadi lewat kongres di Medan, Juni 1996. Dualisme kepemimpinan terjadi sampai ke tingkat daerah. Akhirnya, pemerintah hanya mengakui PDI versi Soerjadi yang dianggap sah. Kegiatan PDI Mega dilarang, seperti PDI Alex Litay di culik, dan ada upaya secara sistematis untuk mematikan langkah Mega. Dari sini, simpati terhadap Megawati mulai bergulir.

Kantor PDI Diserbu
Pagi 27 Juli 1997, kantor PDI di Jalan Diponegoro yang dipakai para pendukung Megawati diserbu pendukung Soerjadi yang dibantu aparat keamanan. Alasan yang dipakai adalah aktivitas di kantor itu dianggap telah mengganggu stabilitas. Kasus itu membuat nama Megawati makin berkibar karena sebagai pihak tertindas, ia langsung mendapat dukungan kuat dari rakyat.

Kongres Bali
Setelah Soeharto jatuh, Mega mendapat ruang gerak yang keluas-luasnya dengan menyelenggarakan kongres yang sangat megah dan mewah di Denpasar, Bali, pada Oktober 1998. Pada kongres ini, Mega terpilih sebagai formatu tunggal untuk membentuk kepemimpinan. Tanda-tanda PDI versi Mega akan menjadi bagian nyata dari dukungan dan antusiasme masyarakat. Tapi, setelah itu Mega mendapat kritik pedas karena hanya diam, tak pernah memberi ataupun menyetujui ide segar. Untuk kepentingan pemilu, PDI versi Mega berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan lambang banteng gemuk, Februari 1999.

PDI Perjuangan Menang Pemilu
Luar biasa, PDI Perjuangan berhasil mengumpulkan 35,6 juta lebih suara, setara dengan 153 kursi, mengalahkan Partai Golkar dan PAN yang diramalkan bakal keluar sebagai pemenang karena ketokohan Amien Rais dalam memperjuangkan reformasi.

Poros Tengah Terbentuk
Penolakan terhadap B.J. Habibie cukup kuat, begitu pula terhadap Megawati. Keduanya mempunyai tingkat resistensi yang tinggi. Karena itu, kehadiran Poros Tengah yang memunculkan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden, Juli 1999, mengguncangkan pesantren menuju kursi presiden.

dalam pertemuan politik dengan Poros Tengah dan Golkar? Selama ini terkesan sekali Megawati tidak mau mengikuti permainan Poros Tengah. Kita masih ingat ketika Sidang Tahunan MPR tahun lalu, Poros Tengah sudah mengendahkan untuk membuat satu ketetapan yang membatasi kekuasaan presiden, hanya sebagai kepala negara saja. Sementara untuk kepala pemerintahan diserahkan kepada wakil presiden.

Poros Tengah sudah berupaya mati-matian, tetapi yang didorong justru tidak mau. Penolakan pun dilakukan secara mati-matian. Tidak hanya datang dari PKB, tetapi juga dari PDI-P. Langkah pertama Poros Tengah untuk main mata dengan banteng gemuk batal. Padahal, bila Megawati mau, barangkali keadaan tidak akan seburuk sekarang. Alasan penolakan Megawati adalah konstitusional. Tidak ada pasal yang mengatur di dalam UUD untuk memberikan batasan atau pembagian kekuasaan semacam itu. Dalih konstitusi seperti inilah yang membuat PDI-P sering tidak fleksibel dalam merespons perkembangan politik. Namun, di sini pula sebenarnya letak konsistensi mereka.

Begitu pula dengan desakan agar presiden segera mengundurkan diri. PDI-P tidak mau ikut-ikutan. Partai yang pernah menjadi korban penindasan Orde Baru ini tetap menginginkan sesuai dengan UUD, yakni presiden berkuasa sampai habis masa jabatannya pada 2004. Bahkan Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan mengeluarkan perintah kiriman kepada jajarannya untuk tidak ikut-

kontrak sosial konkret sampai 2004. Dan ini ada kontrak sosial, para menteri juga. Kalau ada yang KKN, harus out. Itu tegas," kata Ade Komaruddin, anggota DPR dari Fraksi Golkar.

Mereka sangat yakin Mega akan mampu mengemban tugas kepresidenan. Untuk mendukung langkah Mega akan dilakukan pembagian kekuasaan dengan kelima fraksi itu plus TNI. Meski begitu, kaukus ini tetap menggunakan pijakan konsistensi dalam melangkah. Soal pembagian kekuasaan rupanya jadi diskusi penting. Misalnya untuk posisi wakil presiden diminta agar diberikan kepada Hamzah Haz dari PPP. Dengan alasan sebagai fraksi terbesar ketiga, partai ini tidak mendapat apa-apa. Ketua umum Golkar dan PAN sudah menjadi ketua DPR dan MPR, sedangkan PDI-P mendapat wakil presiden. Tentu saja belum sampai kata final. Meski persamaan persepsi mulai tumbuh.

Perubahan Sikap. Yang menjadi tanda tanya, mengapa PDI-P tiba-tiba mau ikut

28

14 MARET 2001 • PANJI

Keterangan Gambar: Salah satu isi Majalah tentang Proses "Perjalanan" Politik Megawati dari Wakil Presiden menjadi Presiden.



Keterangan Gambar: Salah satu isi Majalah tentang Program "Jurus" Pemulihan Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Megawati



Keterangan Gambar: Salah satu isi Majalah tentang Program "Jurus" Pemulihan Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Megawati